

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL UNIVERSITAS TERBUKA DALAM PENCAPAIAN MDGs

Pardamean Daulay

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Terbuka

pardameandaulay@ut.ac.id

## ABSTRAK

Tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)* merupakan kesepakatan beberapa kepala negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara yang telah menandatangani deklarasi MDGs pada tahun 2000, namun setelah 12 tahun berjalan implementasinya di Indonesia tampaknya masih jauh dari harapan. Banyak hal yang menyebabkan lambatnya pencapaian MDGs tersebut, diantaranya peran serta elemen masyarakat yang masih kurang. Sudah saatnya, pemerintah melibatkan dan mendorong rasa kepemilikan bersama (*ownership*) terhadap pencapaian MDGs melalui peran dunia usaha, masyarakat sipil dan juga perguruan tinggi. UT sebagai perguruan tinggi yang menerapkan Sistem Belajar Jarak Jauh memainkan peran penting dalam pencapaian MDGs karena dapat menjangkau mahasiswa sampai tingkat kecamatan dan dalam jumlah besar. Hal ini dapat menjadi modal besar bagi UT untuk berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam mencapai sasaran MDGs. Paper ini akan mengeksplorasi keterlibatan UT sebagai salah satu perguruan tinggi jarak jauh dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia yang merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial kepada masyarakat. Diharapkan paper ini akan membuka pemahaman bahwa Tanggung Jawab Sosial tidak hanya sekedar melakukan pengabdian masyarakat di lokasi yang jauh, tetapi sebaliknya juga harus difokuskan pada pembangunan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar berdasarkan prinsip *peacefull co-existence* (hidup berdampingan secara damai) dan *symbiosis mutualism* (hidup saling menguntungkan antara UT dengan masyarakat sekitar secara berkelanjutan) bagi pencapaian MDGs 2015.

Kata Kunci: MDGs, tanggung jawab sosial Universitas Terbuka, komunitas lokal, sosial ekonomi

## Pendahuluan

Tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)* merupakan kesepakatan beberapa kepala negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Deklarasi MDGs berisi kesepakatan negara-negara tentang arah pembangunan berikut sasaran-sasarannya yang perlu diwujudkan. Secara ringkas, arah pembangunan yang tercantum dalam Deklarasi MDGs meliputi: *pertama*, menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; *kedua*, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; *ketiga*, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; *keempat*, menurunkan kematian anak; *kelima*, meningkatkan

kesehatan; *keenam*, melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa); *ketujuh*, menjamin keberlangsungan lingkungan; dan *kedelapan*, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara yang telah menandatangani deklarasi MDGs pada tahun 2000, namun dalam implementasinya masih jauh dari harapan. Laporan pencapaian MDGs 2000–2008 menunjukkan bahwa beberapa target terkait nutrisi anak, kesehatan ibu, dan akses terhadap air bersih, masih belum menunjukkan kemajuan yang memuaskan. Demikian halnya dengan pemberantasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak masih dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini dapat diamati dari laporan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2007, angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 16,58%, dengan populasi penduduk miskin tercatat sekitar 37,17 juta jiwa, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2009 berada pada peringkat 111 dari 182 negara.

Banyak hal yang menyebabkan lambatnya pencapaian MDGs di Indonesia, diantaranya kurangnya peran serta elemen masyarakat. Pencapaian MDGs sebenarnya tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat. Namun, hingga saat ini masih banyak komponen masyarakat yang belum mengetahui tentang tujuan dan tahapan pencapaian MDGs. Seiring dengan sisa waktu 3 tahun sebagai batas pencapaian MDGs tahun 2015, maka sudah saatnya pemerintah melibatkan dan mendorong rasa kepemilikan bersama (*ownership*) terhadap pencapaian MDGs melalui peran dunia usaha, masyarakat sipil dan juga perguruan tinggi. Tanpa mengabaikan peran dunia usaha dan masyarakat sipil, peran perguruan tinggi tampaknya cukup penting karena melalui Tri Dharma-nya dapat menyumbang secara substansial pada upaya pencapaian target MDGs melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan dalam menerapkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat. Dalam ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan setiap dosen untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. UT sebagai perguruan tinggi yang menerapkan Sistem Belajar Jarak Jauh memainkan peran penting dalam pencapaian MDGs karena dapat menjangkau mahasiswa sampai tingkat kecamatan dan dalam jumlah besar.

Makalah ini akan mengeksplorasi keterlibatan UT sebagai salah satu perguruan tinggi jarak jauh dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia. Diharapkan paper ini akan membuka pemahaman bahwa tanggung jawab Sosial UT tidak hanya sekedar melakukan pengabdian masyarakat, tetapi sebaliknya dapat memfokuskan pada pembangunan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar berdasarkan prinsip *peacefull co-existence* (hidup berdampingan secara damai) dan *symbiosis mutualism* (hidup saling menguntungkan antara Universitas dengan masyarakat sekitar secara berkelanjutan).

## Sekilas Tentang CSR

Belakangan ini tanggung jawab sosial menjadi jargon atau istilah yang tidak lagi menjadi domain bidang manajemen, melainkan sudah dipakai meluas di hampir semua kegiatan manusia, baik itu bisnis, politik, hukum dan lain-lain. Timbulnya istilah ini berawal dari adanya dampak positif yang diciptakan suatu kegiatan pada kehidupan manusia di satu pihak dan kerusakan maupun dampak negatif yang terjadi pada kehidupan masyarakat dan lingkungan di lain pihak. Namun demikian, umumnya istilah tanggung jawab sosial ini lebih banyak berkaitan dengan kegiatan bisnis atau lebih banyak kita kenal sebagai istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Secara sederhana, CSR<sup>1</sup> merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, kelompok masyarakat lokal dan masyarakat secara lebih luas. Sementara itu, secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap strategic-stakeholdernya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Dengan demikian, CSR atau apapun istilah dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi social, ekonomi, dan lingkungan, serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Komitment pemerintah untuk mewajibkan pelaku usaha melaksanakan CSR telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang CSR khususnya pada pasal 74, yang didalamnya mewajibkan setiap perusahaan industri melaksanakan program CSR. Namun dalam prakteknya, tujuan CSR nyaris kehilangan arah. Dikatakan demikian karena implementasi CSR cenderung diidentikkan kedalam bentuk *charity* dari pelaku usaha atau organisasi kepada masyarakat. Padahal makna dari CSR idealnya sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan pelaku usaha atau organisasi bagi keuntungan (investasi) organisasi atau perusahaan di satu pihak dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan di lain pihak. Hilangnya makna dan kegunaan CSR ini utamanya karena CSR sering dipersepsikan oleh pelaku usaha atau organisasi sebagai suatu burden atau biaya tambahan (*additional costs*) sehingga berdampak pada menurunnya profit yang dapat diperoleh perusahaan. Selain itu, pemaknaan CSR masih banyak diartikan sebagai suatu kegiatan yang bersifat *voluntary* dan bukan *compulsory*.

---

<sup>1</sup> Istilah yang hamper sama dan berkaitan dengan CSR adalah Investasi Sosial Perusahaan (*Corporate Social Investment*), Pemberian Perusahaan (*Corporate Giving*), Kedermawanan Perusahaan (*Corporate Philantropy*), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (*Corporate Community Relations*), Pengembangan Masyarakat (*Community Development*).

Implikasi dari persepsi yang salah atau yang direkayasa tersebut di atas menyebabkan berbagai aktivitas CSR yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan cenderung hanya sebatas "kosmetik" belaka tanpa memberikan nilai kegunaan dan nilai tambah bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat. Nuansa "kosmetik" tersebut menurut Wibowo (2006) tercermin dari berbagai aspek sejak perumusan kebijakan dan penentuan orientasi program, pengorganisasian, pendanaan, eksekusi program, hingga evaluasi dan pelaporan. Dalam tataran praktik, CSR hanya sekedar berfungsi sebagai *public relation*, citra korporasi, atau reputasi dan kepentingan perusahaan untuk mendongkrak nilai saham. Selengkapnya perbandingan pro dan kontra tentang konsep CSR dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pro dan Kontra CSR**

Kontra CSR	Pro CSR
CSR menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan perusahaan	Jika tidak menerapkan SCR, kelangsungan perusahaan kelak akan menemui hambatan dan CSR sudah diakui sebagai bagian dari investasi.
CSR menimbulkan biaya yang tidak setara bagi perusahaan, sehingga kompetensi yang sehat tidak tercapai	Setiap bisnis menghadapi kondisi lingkungan fisik dan sosial yang berbeda, sehingga investasi untuk manajemen dampaknya menjadi tidak sama. Kompetisi yang sehat selayaknya dikur pula bagaimana dampak lingkungan dan sosial dikelola, bukan hanya dari indikator-indikator finansial.
CSR hanya menambah biaya yang tidak perlu pada masyarakat terutama konsumen	Selama ini perusahaan yang tidak menjalankan CSR yang menggeser biaya-biaya pada masyarakat walaupun konsumen mungkin saja tidak terlibat melalui eksternalitas.
Menerapkan CSR membutuhkan keterampilan sosial yang tidak dimiliki dunia usaha	Perusahaan tidak dapat mengelak dari tanggungjawab mengelola dampak operasinya, perusahaan seharusnya melakukan internalisasi, termasuk berinvestasi untuk kererampilan baru tersebut.
CSR menempatkan tanggungjawab pada perusahaan, padahal yang jelas memiliki tanggungjawab adalah individu-individu yang bekerja pada perusahaan	CSR tidak dimaksudkan untuk menggantikan tanggungjawab individu, emalainkan mengauki adanya tanggungjawab kolektif perusahaan sebagai pihak yang bisa memperoleh manfaat dan menimbulkan biaya bagi masyarakat
CSR hanya sebagai alat pemasaran (kosmetik), tidak menjalankan secara substansial	Banyak konsep lain yang juga digunakan dunia usaha atau siapapun, namun tetap sah dipergunakan karena memang memiliki nilai sendiri
Pasar tidak atau belum menghargai CSR dengan sungguh-sungguh, sehingga intensif bagi perusahaan sebetulnya masih sangat sedikit	Diakui sebagai keterbatasan CSR

Sumber, Sedyono dkk. (eds.), 2007

Sebenarnya konsep CSR tidaklah sama dengan karikatif (*charity*) atau *philanthropy* (kedermawanan) yang lebih spontan pemberiannya dan kurang memiliki efek jangka panjang dalam konteks pemberdayaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Firdausy (2009), CSR adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan pelaku usaha atau organisasi bagi keuntungan (investasi) organisasi atau perusahaan di satu pihak dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan di lain pihak. Artinya, dengan implementasi CSR masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (*sustainability*) sehingga perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Teguh S. Pambudi dalam Widyantoro, dkk (2009) menyatakan ada lima pilar konsep CSR, yaitu; Pertama, *building human capital*, sosial, lingkungan menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang handal (internal). Disini perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan, biasanya melalui *community development*. Kedua, *strengthening economies*, memberdayakan ekonomi komunitas. Ketiga, *assessing social*, perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik. Keempat, *encouraging good governance*. Perusahaan dikelola dalam tata pamong/birokrasi yang baik. Kelima, *procteting the environment*, perusahaan harus mengawal kelestarian lingkungan.

Bertolak dari pemahaman di atas, ternyata CSR itu tidak saja bergerak di wilayah eksternal perusahaan, tetapi juga di ruang internal. Bahkan, Gurvy Kavei, pakar manajemen Universitas Manchester, menyatakan bahwa sejatinya dipraktekkan di tiga area; (1) di tempat kerja, seperti aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan skill karyawan, dan pemilikan saham, (2) di komunitas, antara lain dengan memberi beasiswa dan pemberdayaan ekonomi, (3) lingkungan, misalnya pelestarian lingkungan dan proses produksi yang ramah lingkungan. Analog dengan konsep tersebut di atas, perguruan tinggi/universitas seyogyanya juga melibatkan kepeduliannya ke dalam *building human capital*, *community development*, *assessing social*, *encouraging good governance*, dan *procteting the environment* yang dipraktikkan ke dalam tiga area yakni di tempat kerja, di komunitas, dan lingkungan.

### **Tanggung Jawab Sosial Universitas (USR)**

Tanggung Jawab Sosial Universitas sebagai terjemahan dari *Universitas Sosial Responsibility* (USR) dalam konteks ini merupakan analogi dari istilah *Corporote Social Responsibility* (CSR) yang sering diterjemahkan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dengan menimbang bahwa perguruan tinggi/universitas berkarakteristik nirlaba, maka istilah *corporate* menjadi kurang tepat sehingga digunakan istilah universitas sebagai padanannya (Widyantoro, dkk, 2009)..

Sejalan dengan perkembangan konsep CSR, maka tanggung jawab sosial universitas saat ini telah berubah dibandingkan beberapa dekade lalu. Tanggung jawab sosial universitas tidak lagi dapat dipandang sebatas produsen atau laboratorium pengetahuan, pendidikan, penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat, kebebasan mimbar akademis dan institusi untuk memperoleh kebenaran, melainkan telah mengalami transformasi yang luar biasa ke dalam kehidupan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, tanggung jawab sosial universitas tidak lagi sebatas menara gading (*ivory tower*) penghasil sarjana belaka, namun telah berkembang sedemikian kompleksnya bahkan mungkin melebihi tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan. Bahkan, di mata masyarakat kini perguruan tinggi/universitas telah dianggap sebagai institusi yang serba bisa, ampuh dan paten serta dipercaya dalam menjawab permasalahan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Firdausy, 2009).

Namun, rumusan konsep yang jelas dan memadai untuk memposisikan bagaimana sebenarnya tanggung jawab sosial yang harus dimainkan universitas nyaris masih sangat terbatas. Konsep tanggung jawab sosial universitas di Indonesia masih banyak berkuat pada upaya bagaimana menggeser kurva pasokan jumlah sarjana ke sebelah kanan, masalah *link and match*, kontribusi perguruan tinggi dengan Tri Dharmanya atau dalam upaya mendidik mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab (Gibbons, 2005). Bahkan, tanggung jawab sosial universitas belakangan ini “dikacaukan dengan munculnya keinginan sebagian kita untuk menghapuskan ujian negara maupun masalah yang berkaitan dengan penting tidaknya gelar kesarjanaan dan lain-lain yang jauh dari substansi etika, moral dan filosofi pendidikan itu sendiri. Barangkali, tanggung jawab sosial universitas dalam ruang lingkup tersebut sah-sah saja, karena keberadaan universitas memang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswanya dalam memiliki pengetahuan yang diinginkan atau lebih luas lagi untuk memuaskan keinginan para stakeholdersnya. Namun, menurut Firdausy (2009) tanggung jawab sosial seperti itu rasanya sudah “*out of date*” alias ketinggalan zaman.

Berdasarkan uraian di atas, maka perguruan tinggi/universitas dituntut untuk memiliki kesadaran untuk menerapkan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, bukan sekedar pada tataran kedermawanan, namun menjangkau kepada persoalan *sustainability development*. Perguruan tinggi/universitas dapat berperan sebagai agen pemberdayaan masyarakat disekitarnya melalui peningkatan dan pengembangan tata sosial ekonomi, kesehatan, maupun kondisi lingkungan berdasarkan prinsip *peacefull co-existence* (hidup berdampingan secara damai) dan *symbiosis mutualism* (hidup saling menguntungkan antara universitas dengan masyarakat sekitar secara berkelanjutan). Jika tanggung jawab sosial universitas tersebut dapat diterapkan, maka berpotensi besar dalam menurunkan angka kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama MDGs.

## **Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)**

Secara historis semangat CSR sudah mulai muncul pada tahun 1918 di Amerika Serikat. Semangat itu terus bergulir semakin kencang dan disuarakan kian lantang seiring dengan perkembangan industrialisasi dan kapitalisme global yang cenderung merusak terhadap lingkungan dan secara sosial “distortif”. Berlandaskan pada praktek-praktek kapitalisme, yang secara moral, etika dan sosial-kemanusiaan memiliki problematik, kemudian mendorong dikeluarkannya kebijakan Millenium Development Goals (MDGs)

Tepatnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium (Millenium Declaration). Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia (basic huma need). Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs).

Ada delapan sasaran atau tujuan yang harus dicapai sebagai target pembangunan yang spesifik, bertenggat waktu dan terukur. Tujuan dan target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan
  - Mengurangi sampai setengah penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari US \$ 1 perhari
  - Mengurangi sampai setengah penduduk dunia yang menderita kelaparan
2. Tercapainya pendidikan dasar secara universal
  - Memastikan bahwa setiap anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasarnya
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
  - Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah (tahun 2005) dan untuk semua tingkatan (tahun 2015)
4. Menurunkan tingkat kematian anak
  - Mengurangi sampai dua pertiga tingkat kematian balita
5. Meningkatkan kesehatan ibu
  - Menurunkan sampai tiga perempat rasio kematian ibu pada proses melahirkan
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain
  - Menghentikan dan mulai mencegah penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

## 7. Menjamin keberlanjutan lingkungan

- Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan negara dan program; serta memperbaiki sumber daya lingkungan yang rusak atau hilang
- Menurunkan sampai 50% jumlah orang yang tidak memiliki akses (secara berkelanjutan) untuk memperoleh air bersih (aman untuk diminum)

## 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

- Mengembangkan lebih jauh perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminasi, termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan, dan penurunan tingkat kemiskinan, baik secara nasional maupun internasional
- Membantu kebutuhan khusus negara kurang berkembang, termasuk negara kepulauan dan terpencil.
- Secara komprehensif membuat persetujuan mengenai masalah hutang negara-negara berkembang
- Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk orang muda
- Bekerja sama dengan industri farmasi dalam penyediaan obat-obat penting yang terjangkau di negara-negara berkembang
- Bekerja sama dengan pihak swasta yang memberikan keuntungan di bidang teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Oleh karena itu, kedelapan tujuan MDGs telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara obyektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. MDGs sendiri diformulasikan dengan memperharikan enam nilai fundamental (kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, penghargaan terhadap alam, dan tanggungjawab bersama) yang dipercaya mampu membuat dunia berkembang ke arah yang lebih inklusif dan setara (Andirani, dkk, 2008).

UT sebagai perguruan tinggi yang menerapkan Sistem Belajar Jarak Jauh memainkan peran penting dalam pencapaian MDGs karena dapat menjangkau mahasiswa sampai tingkat kecamatan dan dalam jumlah besar. Hal ini dapat menjadi modal bagi UT untuk berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam mencapai sasaran MDGs. Dari kedelapan sasaran MDGs di atas ada beberapa sasaran yang dapat dicapai melalui mata kuliah di program PGSD dan secara khusus melalui kegiatan Abdimas yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial UT terhadap masyarakat.

## **Mencapai MDGs melalui Tanggung Jawab Sosial UT**

UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh di Indonesia merupakan salah satu bentuk industri jasa yang menarik dan relevan untuk dicermati dalam kaitannya dengan Tanggung jawab Sosial-nya. Memosisikan lembaga pendidikan semacam UT sebagai sebuah industri mungkin mengundang banyak pertanyaan, tetapi pilihan ini secara teoritis dapat diterima dengan memahami pengertian pendidikan jarak jauh sebagaimana yang disebutkan Keegan (1984) bahwa salah satu karakteristik pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah adanya pengelolaan program pendidikan yang mengarah pada cara-cara yang dilakukan secara industrial. UT dapat dikategorikan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan produksi jasa yang dikerjakan berdasar nilai-nilai modern (rasional). Hal ini merujuk pada Schneider (1986), industri diartikan sebagai organisasi sosial yang didalamnya terdapat lembaga-lembaga yang saling terkait, misalnya antara pabrik sebagai lembaga inti dengan transportasi, produksi bahan-bahan mentah, dan produksi barang-barang jadi.

Sebagai suatu bagian dari industri jasa pendidikan, UT berkewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial-nya sebagaimana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Kepmen BUMN, Nomor 236/MBU/2003 yang intinya menyangkut pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), implementasi program ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 40 tahun 2007 tentang CSR khususnya pasal 74 yang memuat kewajiban perusahaan, untuk melakukan kegiatan CSR.

Secara kelembagaan, UT telah memiliki program pengabdian masyarakat sebagai upaya dalam mewujudkan tanggung jawab sosial UT sesuai peraturan pemerintah tersebut. Kegiatan abdimas merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi melalui peran serta dosen-dosennya di tengah masyarakat dalam rangka mengembangkan kemampuan masyarakat terutama kelompok masyarakat marginal. Hal sejalan dengan ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan setiap dosen melaksanakan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi.

Kewajiban melakukan Abdimas bagi setiap individu dosen UT juga sejalan dengan visi dan misi UT, yaitu: (a) pada akhir tahun 2011, UT harus mampu: (1) menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat paling sedikit meliputi 30 (tiga puluh) wilayah binaan, termasuk yang dilakukan melalui program Abdimas para dosen UPBJJ, dan (2) menyelenggarakan paling sedikit satu program pengabdian masyarakat berskala nasional, (b) pada akhir tahun 2012, UT diharapkan mampu: (1) menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat paling sedikit di sembilan wilayah binaan, termasuk yang dilakukan oleh UPBJJ, dan (2) menyelenggarakan paling sedikit dua program pengabdian masyarakat berskala nasional, dan (c) pada akhir tahun

2013, UT diharapkan mampu: menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat paling sedikit di sepuluh wilayah binaan, termasuk yang dilakukan oleh UPBJJ (Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UPBJ-UT, 2011).

Program-program Abdimas tersebut dikoordinasikan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat [PPM] di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [LPPM]. Dalam operasionalnya, kegiatan Abdimas UT diupayakan agar dapat menunjang pencapaian tujuan MDGs. Oetoyo dan Daulay (2010) membagi beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat [abdimas] yang sudah dilaksanakan dan direncanakan oleh PPM-UT pada tahun 2009 dan 2010, sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan Abdimas UT Tahun 2009-2010

Nomor	Jenis Kegiatan	
	Tahun 2009	Tahun 2010
1.	Program pemberantasan buta aksara [PBA]	Program pemberantasan buta aksara [PBA] tingkat dasar
2.	Pendidikan berkelanjutan [FMIPA, FISIP]	Program Bahasa Inggris untuk Penutur Asing [BIPA-FKIP]
3.	Program Bahasa Inggris untuk Penutur Asing [BIPA] [FKIP]	Program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa [FISIP]
4.	Pelaksanaan berbagai kegiatan penyuluhan peningkatan kemampuan pemanfaatan media dan pembelajaran secara nasional	Program Sertifikat Statistika Pemerintahan [FMIPA]
5.		Program Continuing Education/CE
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi kegiatan bazar</li> <li>• Program pemberdayaan masyarakat [berkoordinasi dengan fakultas]</li> </ul>	Bansos dan Bina Lingkungan UT kepada masyarakat Tangsel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghijauan</li> <li>• Pengelolaan sampah</li> <li>• Penyuluhan kesehatan</li> <li>• Peningkatan kualitas pendidikan</li> </ul>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kapasitas sekolah di lingkungan YPPI [berkoordinasi dengan fakultas dan yayasan]</li> </ul>	Abdimas Dosen UPBJJ -UT
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak lanjut perintisan program kerjasama PPM</li> </ul>	Penyuluhan dan pemanfaatan biopori di Perum Desa Jabon Mekar serta di Desa Cabe Ilir di Sekitar UT

Sumber, Oetoyo dan Daulay (2010)

Mencermati kegiatan-kegiatan PPM UT di atas, maka ada empat kegiatan besar yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan delapan kegiatan besar yang dilaksanakan pada tahun 2010. Jika dihubungkan dengan delapan tujuan MDGs, maka kegiatan Abdimas yang telah dilaksanakan UT, ternyata memiliki peran penting dalam pencapaian MDGs. Adapun beberapa kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

*Pertama*, kegiatan Pemberantasan Buta Aksara [PBA]. Program PBA merupakan kegiatan yang menyentuh masyarakat secara langsung. UT telah menyelenggarakan program PBA selama 4 tahun, yaitu sejak tahun 2006. Dalam kurun waktu 4 tahun tersebut, UT telah

bekerja sama dengan Ditjen PNFI, Depdiknas, PP-PNFI Regional 1 dn 2, serta Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten sebagai penyedia dana. Dalam implementasinya, kegiatan PBA ini dikaitkan dengan kurikulum Program S1 PGSD FKIP sebagai mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan [PDGK4306]. Oleh karena itu, Program PBA, selain bertujuan membantu masyarakat yang buta huruf [calistung = baca, tulis, hitung] menjadi melek huruf, mahasiswa yang melaksanakan program ini mendapatkan nilai praktek dari mata kuliah yang diikutinya. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan PBA cukup menggembirakan dengan banyaknya warga belajar yang berhasil dituntaskan dari buta calistung, yaitu pada tahun 2006 ada 3.534 warga belajar dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan yaitu 5.842 warga belajar (Zubaidah, 2008).

Program PBA ini tentu saja merupakan salah satu sarana pendukung dalam pencapaian Tujuan MDGs. Meskipun secara tidak eksplisit tertera pada tujuan tertentu dari delapan tujuan MDGs, namun penurunan angka buta aksara akan mendorong tercapainya tujuan-tujuan MDGs seperti tujuan mengurangi kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, karena kemampuan membaca dan menulis akan memberi kesempatan untuk menambah pengetahuan serta akses terhadap aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya akan dapat mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan. Lebih lanjut, Zubaidah (2008) menyatakan bahwa secara spesifik program PBA yang dilakukan oleh UT dapat menurunkan angka buta aksara dan pengetahuan bagi sebagian besar kaum perempuan. Penurunan angka buta aksara perempuan sudah tentu akan mendorong tercapainya target penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah (Tujuan 3). Peningkatan pengetahuan perempuan juga akan dapat mengurangi angka kematian bayi mengingat ibu sangat berperan dalam pengasuhan anak (Tujuan 4), meningkatkan kesehatan ibu itu sendiri (Tujuan 5), serta memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya (Tujuan 6).

*Kedua*, pemberdayaan masyarakat, dalam konteks abdimas UT di Desa Pondok Cabe Ilir dan Pondok Cabe Udik yang merupakan wilayah sekitar Kantor UT Pusat, PPM-UT bekerja sama dengan fakultas, telah melaksanakan kegiatan berupa bantuan fisik seperti pembuatan saluran air dan WC, dan bantuan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan dan pengobatan gratis untuk warga. Kegiatan lain adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat [abdimas] dosen UT, misalnya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik [FISIP] melaksanakan kegiatan abdimas di tahun 2009 dan 2010, antara lain di Sukabumi, Jawa Barat berupa penyuluhan kepada masyarakat dan kepada guru-guru dan pegawai kecamatan.

Sementara itu, sejak tahun 2010, kegiatan abdimas dosen UT di UPBJJ diarahkan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan warga buta aksara yang telah mendapat pembinaan dari UT. Untuk UPBJJ yang telah pernah menyelenggarakan program PBA maka disarankan agar program intervensi Abdimas yang akan dilakukan adalah

merupakan tindak lanjut yang relevan dengan kehidupan komunitas warga belajar pada program PBA sebelumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa komunitas masyarakat warga belajar pada program PBA sangat berkorelasi dengan rendahnya tingkat kehidupan mereka baik kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraannya. Disamping itu, keberhasilan UT dalam menurunkan tingkat kebutaksaraan tersebut perlu secara terus menerus dilanjutkan agar mereka tidak menjadi buta aksara kembali (*re-literacy*), karena terdapat kecenderungan penduduk yang semula sudah melek aksara atau penduduk dewasa yang berkeaksaraan rendah lainnya kembali menjadi buta aksara (*relapsed literacy*), apabila kemampuan keaksaraan yang pernah dimiliki tidak dipergunakan secara berkelanjutan, sehingga lama-kelamaan kemampuan keaksaraan tersebut terkikis habis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan pada program pemberdayaan ekonomi warga buta aksara melalui kegiatan usaha mandiri. Program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan MDGs dalam menghapus kemiskinan dan kelaparan (Tujuan 1).

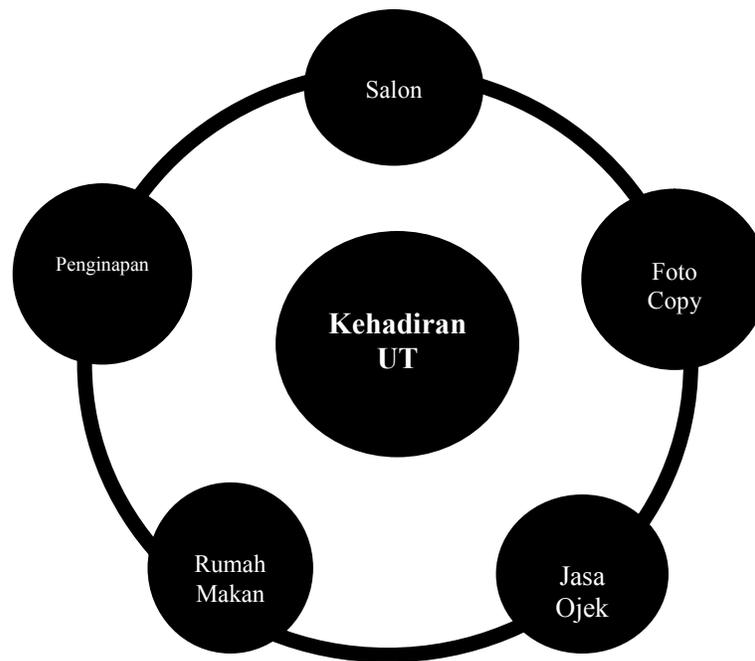
*Ketiga*, program penghijauan. Program penghijauan di UT dimulai dengan penanaman pohon di sekitar kantor UT Pusat pada tahun 2009. Program penghijauan berskala nasional baru dimulai tahun 2011 dengan memilih daerah kritis di Pulau Jawa, misalnya penghijauan di Jawa Timur dilakukan pada lahan bekas tambang tanah liat PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang berada di Kelurahan Ngipik, Kabupaten Gresik dan Pantai Tuban, Kabupaten Tuban. Gerakan nasional menanam satu miliar pohon ini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dan sekaligus bagian dari tanggung jawab sosial UT dalam pencapaian tujuan MDGs yaitu; menjamin keberlanjutan lingkungan (Tujuan 7).

*Keempat*, pendidikan berkelanjutan. Salah satu wujud komitmen UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh adalah meningkatkan kemitraan dengan masyarakat guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*). Berkenaan dengan hal itu, UT menawarkan program pendidikan berkelanjutan dalam bidang peningkatan kualifikasi akademik bagi perangkat desa melalui Program Sertifikat administrasi pemerintahan Desa. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap para aparat dan perangkat desa agar dapat melaksanakan tugas secara profesional sehingga mampu mengelola jalannya pemerintahan desa, mengelola berbagai program pembangunan desa dan pelayanan umum lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat. Bila dikaitkan dengan pencapaian tujuan MDGs, maka program pendidikan berkelanjutan terkait dengan pengembangan kemitraan global untuk pembangunan (Tujuan 8).

### **"Model Kerja Kolaborasi" : Agenda Tergagas dalam Pemberdayaan Komunitas Lokal**

Sumbangan UT dalam menurunkan angka buta aksara melalui Program PBA dan beberapa kegiatan abdimas yang dilakukan oleh fakultas dan kegiatan abdimas dosen UT baik di UT Pusat maupun di UPBJJ, merupakan bagian integral dan bukti nyata dari tanggung jawab sosial UT dalam pencapaian tujuan MDGs. Namun, bila ditelusuri secara mendalam beberapa sumbangan kegiatan tersebut tampaknya masih berskala nasional sehingga belum menyentuh permasalahan seluruh *stakeholder*, misalnya masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kantor UT Pusat. Mengacu pada paradigma baru Tanggung Jawab Sosial Universitas sebagai mana yang dijelaskan Firdausy (2009) tidak lagi sebatas menara gading (*ivory tower*) penghasil sarjana belaka, namun berkembang sedemikian kompleksnya dan mungkin melebihi tanggung jawab sosial perusahaan.

"Model Kerja Kolaborasi" antara berbagai pihak merupakan model alternatif yang digagas dalam kesempatan ini sebagai bagian dari tanggungjawab sosial UT bagi komunitas lokal yang patut dipertimbangkan. Model kerja kolaborasi ini didasarkan pada temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Oetoyo dan Daulay, 2010) yang menunjukkan bahwa kehadiran UT berpengaruh terhadap kehidupan para penduduk lokal. Jika sebelumnya, warga menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian, tetapi saat ini usaha yang dilakukan cukup beragam. Misalnya, membuka warung, membuka usaha bengkel, rumah kos, salon kecantikan dan usaha percetakan. Usaha tersebut semakin berkembang sejak UT memiliki gedung yang representatif untuk melaksanakan upacara wisuda dan mulai terbuka berbagai usaha komersial bagi penduduk lokal.



Gambar 1. Relasi antara komunitas lokal dengan UT

Kegiatan 'industrialisasi' pendidikan yang digerakkan oleh UT dengan sendirinya menarik kehadiran penduduk pendatang dan pemodal dari luar untuk mengambil manfaat, baik dalam hal pemenuhan UT akan kebutuhan tenaga kerja dan jasa penunjang kegiatan pendidikan, seperti, toko alat tulis kantor, *photocopy*, penginapan, salon, warung nasi, dan angkutan 'ojeg'. Bagi komunitas lokal, 'industrialisasi' pendidikan tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga ancaman yang menggusur keberadaan status dan peranan mereka karena secara faktual, kondisi komunitas lokal sebenarnya tidak selalu mampu memenuhi tuntutan perubahan sebagai akibat dari industrialisasi pendidikan. Faktor penghambatnya dapat berupa skill, pengetahuan, bahkan modal usaha yang kurang memadai. Pada sisi hambatan-hambatan seperti inilah seyogyanya UT dapat berperan untuk menopangnya melalui pemberdayaan masyarakat lokal dengan cara memberikan bantuan modal, latihan keterampilan, dan menciptakan wirausaha.

Misalnya, keberadaan rumah kos di sekitar kantor UT Pusat cenderung berkembang secara terus menerus dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas manajemen. Rumah kos memiliki peranan penting pada saat kegiatan acara wisuda UT di kantor UT Pusat. Rumah kos merupakan pilihan alternatif bagi mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sebenarnya UT telah wisma yang dapat digunakan sebagai penginapan para wisudawan, namun kapasitasnya belum mampu untuk menampung seluruh wisudawan. Peroalan ini sebenarnya dapat diatasi oleh UT melalui kegiatan tanggung jawab sosial-nya, namun dari hasil penelitian Oetoyo dan daulay (2010) program Abdimas yang terkait dengan perolehan rumah kos wisudawan belum dilakukan. Pada sisi lain, pertumbuhan jumlah rumah kos terjadi secara alamiah bukan *by design* yang disusun bersama antara UT dengan warga komunitas lokal. Warga yang memiliki rumah kos belum tentu karena secara manajerial memiliki pengetahuan tentang manajemen usaha akan tetapi terpanggil untuk menolong para wisudawan yang datang dari luar kota. Selanjutnya pengelolaannya berkembang dan kemudian berorientasi ke dalam bentuk bisnis rumah kos (manajemen yang digunakan merupakan manajemen bisnis). Jika perkembangannya demikian, seharusnya UT perlu untuk peduli kepada pengelola rumah kos yang pada hakekatnya mereka adalah warga komunitas lokal yang bertampat tinggal di sekitar kantor UT yang perlu diberdayakan. Pemberdayaan itu dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan terhadap aspek manajemen bisnis, tata ruang, sanitasi, dan kerja sama dalam bentuk pemberian informasi keberadaan rumah kos yang dikelola oleh warga lokal terhadap wisudawan yang datang dari luar daerah.

## Penutup

Tanggung Jawab Sosial Universitas Terbuka yang telah dilaksanakan selama ini dalam berbagai bentuk pengabdian masyarakat tentu saja merupakan salah satu sarana pendukung dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), karena program Abdimas UT telah berorientasi pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang lebih konkrit dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Bentuk-bentuk program kegiatan Abdimas yang lebih spesifik yang dirumuskan melalui suatu analisis kebutuhan masyarakat merupakan wujud konkrit peran serta UT dalam mensukseskan program pemerintah dalam mengentaskan keterbelakangan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Usaha meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu mengejar keterbelakangan sangat esensial sebagai perwujudan dan bukti bahwa Universitas Terbuka hingga saat ini terus berperan aktif dalam peningkatan indeks pembangunan manusia, baik melalui program pemberdayaan pendidikan-kesehatan-maupun kesejahteraan sebagai wujud nyata pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat.

Model “Kerja Kolaborasi” merupakan agenda teragendakan yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan Tanggung jawab sosial UT terhadap masyarakat sekitar kantor UT Pusat. Bagaimana pun juga, relasi antara masyarakat atau komunitas lokal dengan UT merupakan sebuah keniscayaan. Komunitas lokal tidak dapat berjalan sendiri, sebaliknya UT juga memerlukan komunitas lokal sebagai elemen pendukung dalam menjalankan aktivitasnya. UT berperan sebagai agen pemberdayaan komunitas lokal melalui peningkatan dan pengembangan tata sosial ekonomi, kesehatan, maupun kondisi lingkungan berdasarkan prinsip *peacefull co-existence* (hidup berdampingan secara damai) dan *symbiosis mutualism* (hidup saling menguntungkan antara universitas dengan masyarakat sekitar secara berkelanjutan). Jika model tanggung jawab sosial universitas tersebut dapat diterapkan, maka UT berpotensi besar dalam menurunkan angka kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama MDGs.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andirani, Durri, Noviyanti, Rinda, Pangaribuan, Nurmala (2008). Peranan Pendidikan Jarak Jauh dalam Pencapaian MDGs, *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jau*, 9 (2), 61 – 63.
- Firdausy, Garunia, Mulya, (2009). *Tanggung Jawab Sosial Universitas (USR) dan Pengalaman Ristek dalam Membangun Masyarakat Berbudaya Iptek*, makalah disampaikan dalam seminar Membangun Kesadaran Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Pendidikan Nilai dan Iptek: 25 Tahun Universitas Terbuka Melayani Bangsa, Jakarta, 7 Desember 2009.
- Keegan (1991), *Foundations Of Distance Education*, Biddles Ltd, Great Britain.
- Mashud, Mustain, (2011). Memangun Civil Society di Indonesia Melalui Program CSR, *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 6, (1), 27 – 44
- Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UPBJ-UT, 2011., Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Terbuka.
- Oetoyo, Boedi dan Daulay, Pardamean (2010), *Model Tanggung Jawab Sosial Universitas Terbuka dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Lokal di Sekitar Kampus UT*, Laporan penelitian.
- Sedyono, Chrysanti Hasibuan dkk. (eds.), (2007). *CSR for better Life: Indonesian Context*, Membumikan Bisnis Berkelanjutan, Memahami Konsep & Praktek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Jakarta, Yayasan Business Links.
- Zubaidah, Ida, (2008), *Gerakan Pemberantasan Buta Aksara yang Lebih Efektif melalui Universitas Terbuka*, diambil dari [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id).
- Wibowo, Pamadi (2006). Rentang Program CSR di Mata Para Ahli Pemasaran Dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakatan Madani GALANG*. Vol. 1 No.
- Widyantoro, Agus dan Subhan, M. Hadi (2009). *Tanggung Jawab Sosial Institusi Perguruan Tinggi (Institution Social Responsibility) Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainability Development Bagi Masyarakat Lingkar Kampus*. [http://repo.unair.ac.id/data/richfiles/abstrak%20Sosial%20upload\(8\).pdf](http://repo.unair.ac.id/data/richfiles/abstrak%20Sosial%20upload(8).pdf), diakses 20 Juni 2012.

